

## PENGEMBANGAN dan PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA

1). **Dedi Setyo R**

2). **Salahudin**

1), 2). Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang)

Email: [Dedirahmadi87@yahoo.com](mailto:Dedirahmadi87@yahoo.com)

### *Abstract*

One area whose development is quite lagging compared to other areas is the border area. Villages are the scope of government that broadly plays a role in carrying out regional development, equitable distribution of regional development is needed to support all community needs to achieve the constitutional mandate, namely equitable distribution of national development to realize people's welfare and its distribution throughout its territory, until now there are still many problems. One of the problems that are still encountered is the undeveloped border area between administrative regions within the State of Indonesia. This study aims to find out what we can know in planning equitable development in Indonesia. The research method used in this research is qualitative research. Data obtained through the website kemendes.go.id data processing using the Nvivo 12 application. The results of the study reveal the challenges of equitable distribution of village development. One of the problems that are still encountered is the undeveloped border area between administrative regions within the State of Indonesia. So far, border areas are synonymous with rural areas, agricultural areas, poor areas, etc. For its development, a policy that is locally appropriate is needed, which is compiled based on the results of the identification of potential and development barriers in the border area. The National Development of the State of Indonesia is generally aimed at realizing the welfare of people's lives in a fair and equitable manner throughout the territory of the Republic of Indonesia, both those living in rural areas (rural areas) and urban areas (urban areas). and its distribution throughout its territory. The rationale for village governance is diversity, participation, genuine autonomy, democratization and community empowerment.

**Keywords:** *Even Distribution, Development, Accereleted Development, Poverty*

### **Abstrak**

Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Desa merupakan lingkup pemerintahan yang secara garis besar berperan dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan daerah diperlukan guna menunjang segala kebutuhan masyarakat untuk tercapainya amanah konstitusi yaitu pemerataan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya di seluruh wilayahnya, sampai dengan saat ini masih banyak timbul masalah. Salah satu masalah yang masih dijumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antar wilayah administrasi dalam Negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya apa saja yang dapat kita ketahui di dalam perencanaan pemerataan pembangunan di indonesia metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui website kemendes.go.id pengolahan data menggunakan aplikasi Nvivo 12. Hasil penelitian mengungkapkan

tantangan pemerataan pembangunan desa. Salah satu masalah yang masih dijumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antar wilayah administrasi dalam Negara Indonesia. Wilayah perbatasan selama ini identik dengan wilayah perdesaan, wilayah pertanian, wilayah miskin, dll. Untuk pengembangannya diperlukan kebijaksanaan yang sesuai secara lokalita, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan pengembangan di wilayah perbatasan tersebut. Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (rural area) maupun daerah perkotaan (urban area) Pembangunan Nasional Negara Indonesia yang tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya di seluruh wilayahnya, Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** *Pemerataan, Pembangunan, Percepatan Pembangunan, Kemiskinan*

## PENDAHULUAN

Kawasan Timur Indonesia, kesenjangan kemajuan antara kotadesa, masalah ketenaga-kerjaan, masalah lingkungan hidup, dsb. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah NKRI untuk lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok Negara. Dalam rangka pengurangan ketimpangan antar wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNasional) tahun 2004 – 2009 (Perpres No. 7/2005) telah mengamanatkan bahwa pengembangan daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan terintegrasi dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, Fakta menunjukkan sampai dengan saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan di Indonesia dan menjadi mata pencaharian terbesar penduduk. Konsep pembangunan desa pada masa Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor kedalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa

Menurut (Soleh, 2017) Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

a. wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.

b. wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis.

c. wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan

Meskipun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan formula, persoalan efektivitas dan pemenuhan kriteria keadilan dari Alokasi Dana Desa masih menjadi pertanyaan besar dalam kebijakan keuangan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah melakukan reformulasi pengalokasian Dana Desa berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan formula saat ini dan identifikasi potensi indikator baru untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan terutama peningkatan peran Dana Desa bagi Pemulihan Ekonomi Desa di Masa Pandemi COVID-19. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis melalui kajian literatur, focus group discussion, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya menurunkan bobot Alokasi Dasar untuk mengurangi ketimpangan besaran alokasi Dana Desa, menaikkan bobot Alokasi Formula untuk memastikan alokasi Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa sehingga mendorong alokasi yang lebih berkeadilan dan efektif. Sementara itu, bobot Alokasi Afirmasi perlu dinaikkan dalam jangka pendek, namun kemudian menurun secara gradual di periode setelahnya untuk mencegah timbulnya moral hazard. Selanjutnya untuk mendorong pencapaian kemandirian desa, Alokasi Kinerja perlu dinaikkan sebagai mekanisme reward bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik. Rekomendasi dari kajian ini adalah penyempurnaan formula alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara periodik serta perlu memperhatikan Target dan Indikator SDGs yang dapat diimplementasikan di tingkat desa

Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan (Anonymous, 2015). Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam

skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran termasuk didalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan

Formula alokasi Dana Desa berperan penting dalam memastikan pemerataan pembangunan desa mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa-desa di Indonesia sangat bervariasi. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap-tiap desa saat ini dinilai masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan dianggap masih kurang efektif dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, kesenjangan kemajuan antara kotadesa, masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup, dsb. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah NKRI untuk lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok Negara. Fakta menunjukkan sampai dengan saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan di Indonesia dan menjadi mata pencaharian terbesar penduduk. Selanjutnya, analisis kebijakan anggaran dan transfer saat ini tidak dapat dilepaskan dari situasi pandemi Covid-19. 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang menjelaskan di Pasal 2 ayat huruf I bahwa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa adalah dengan pengutamaan penggunaan Dana Desa yang antara lain dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Kinerja ekonomi yang menurun tajam akibat terganggunya konsumsi serta berhentinya proses produksi di tingkat nasional maupun global menyebabkan ekspor dan impor

mengalami kontraksi dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Untuk itu, strategi realokasi dan pemfokusan ulang anggaran dimana kebijakan anggaran tidak hanya ditujukan untuk meminimalisasi dampak Covid-19 tetapi juga untuk menstimulasi proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di KTI. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna, pada tiap tingkat pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. (Rahadian & Kencana, 2016)

Pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa daerah yang telah berkembang menjadi pusat pelayanan, akan menyerap lebih banyak investasi dan intervensi pembangunan. Sejak dimulainya Repelita VI telah digariskan bahwa koordinasi keseluruhan pembangunan di daerah perlu mencakup segi spasial yang akan memberikan dasar pada masing-masing kawasan, baik pada kawasan khusus, kawasan perdesaan, termasuk dalam hal ini wilayah perbatasan antar propinsi. Dari perspektif teori, desentralisasi di satu sisi

dapat memperbaiki penyediaan layanan publik di daerah karena pemerintah daerah cenderung lebih paham terhadap preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dan secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga biaya penyediaan layanan publik lebih rendah. Desentralisasi juga dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan cara menjadikan pemerintah daerah lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan publik. Pelimpahan kewenangan kepada daerah sendiri tidak serta-merta akan selalu memberikan dampak yang positif apabila pemberdayaan fiskal tersebut tidak diiringi dengan pemberdayaan politis. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. APBN yang dibagikan ke desa berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya apa saja yang dapat kita ketahui di dalam perencanaan pemerataan pembangunan di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui kerja sama internasional daerah. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan nara sumber yaitu Kepala Subdivisi Kerja sama Luar Negeri BKPM (Badan Kerja sama dan Penanaman Modal) DIY, Kepala Subdivisi Penguatan Potensi Masyarakat BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) DIY, Ketua Yayasan Global Saemaul Indonesia (YGSI) serta masyarakat desa Ponjong Gunung Kidul. Wawancara dilakukan dengan metode snowball interview yang bersifat mengalir dari hasil diskusi dengan narasumber.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Globalisasi mendorong setiap daerah berkompetisi melaksanakan pembangunan. Pembangunan menjadi salah satu strategi daerah mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membuka jalan mengatasi kemiskinan. Kerja sama internasional daerah merupakan salah satu strategi mengatasi kemiskinan sekaligus mengurangi ketergantungan kepada pendanaan pusat. Kerja sama internasional daerah juga menjadi sarana untuk mengembangkan potensi daerah. Tulisan ini bertujuan mengamati kerja sama internasional daerah dalam upaya mengatasi



kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan mengambil studi kasus kerja sama internasional Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo Korea Selatan di desa Ponjong Gunung Kidul maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama internasional daerah merupakan salah satu cara mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan potensi desa. Melalui transfer ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan fasilitas publik maka dapat membantu meningkatkan aktifitas perekonomian daerah secara berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan nasional. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan daerah harus merata di seluruh wilayah dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara umum pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk: (a) Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (b) Memperkokoh kesatuan ekonomi Nasional, serta (c) Memelihara efisiensi pertumbuhan Nasional. Poernomosidi H (1975) dalam Listiyah M (1996) menyatakan bahwa salah satu diantara ke tiga tujuan tersebut merupakan sentral, yaitu keseimbangan antar daerah dalam hal pertumbuhan. Keseimbangan antar daerah akan memenuhi keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, dan merupakan bagian untuk mencapai pemerataan Pertumbuhan suatu wilayah akan saling terkait dengan perkembangan fasilitas pelayanan, disebabkan pertumbuhan wilayah membutuhkan dukungan pengadaan dan perluasan pelayanan. Ketersediaan pelayanan di suatu wilayah tersebut pada gilirannya akan menstimulir pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pembangunan wilayah berjalan bersama-sama dengan perwujudan pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah lainnya. Sejak dimulainya Repelita VI telah digariskan bahwa koordinasi keseluruhan pembangunan di daerah perlu mencakup segi spasial yang akan memberikan dasar pada masing-masing kawasan, baik pada kawasan khusus, kawasan perdesaan, termasuk dalam hal ini wilayah perbatasan antar propinsi.

Kebijaksanaan yang mempromosikan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan perdesaan akan efektif apabila dipacu dengan pertumbuhan dan pembenahan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Perencanaan pengembangan wilayah pada

hakekatnya merupakan kelanjutan dari program pembangunan yang berupaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya agar lebih bermanfaat untuk mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. aktor penyebab lambatnya pertumbuhan desa-desa di daerah perbatasan diantaranya: Belum ditemu-kenalnya secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, yang pada dasarnya merupakan faktor pendukung ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut; Lemahnya kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani; dan Kurang terdistribusinya secara merata pelayanan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan dilihat atas dasar lokasi atau agihan keruangan.

Di samping faktor-faktor tersebut, lambatnya perkembangan daerah-daerah perbatasan juga masih ditambah lagi oleh imbas dampak kesenjangan antara desa – kota, seperti investasi ekonomi yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, yang berakibat pada lebih cepatnya wilayah perkotaan tumbuh dan berkembang, sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal . Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas, kualitas petani, dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumberdaya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Sebuah perencanaan skenario merupakan salah satu alternatif untuk menjalankan sebuah perencanaan. Pemahaman akan lingkungan serta formulasi strategi yang tepat merupakan salah satu kunci bagi sebuah kawasan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan skenario dengan permasalahan pembangunan desa tertinggal melalui optimalisasi modal dan peran pelaku pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan desa pada masa Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor kedalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat standarisasi tatanan kehidupan desa. Selama 70 tahun sudah negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang namun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan.



Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi diperkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desakota, wilayah indonesia timur dan barat, dan wilayah jawa dan luar jawa . Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005–2025, diarahkan untuk mewujudkan misi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan kelautan, di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk pertanian perdesaan nasional . Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan. desa dengan desa yang lain (Lewis, 2015). Alasan ini kemungkinan menjadi dasar penyesuaian bobot aspek pemerataan yang semakin menurun dalam formula alokasi Dana Desa, sementara di saat yang sama aspek keadilan semakin meningkat. Formula pengalokasian Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut menetapkan komponen yang menentukan besaran Dana Desa yang diterima suatu desa. Pada awal penerapan, alokasi Dana Desa hanya

ditentukan berdasarkan dua komponen: Alokasi Dasar dan Alokasi Formula (PMK 49/2016) dengan rasio bobot 90:10. Selanjutnya, pemerintah menambah komponen Alokasi Afiriasi ke dalam formula alokasi Dana Desa sebagai bentuk pemenuhan aspek keberpihakan dalam kebijakan

Dana Desa (PMK 199/2017). Perbaikan terakhir atas formula alokasi Dana Desa dilakukan dengan menambahkan komponen Alokasi Kinerja yang merefleksikan aspek kinerja dengan memberikan insentif bagi daerah yang memiliki kinerja tata kelola baik (PMK 205/2019). Berdasarkan tinjauan literatur di atas, maka penyempurnaan atas formula alokasi Dana Desa perlu mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu aspek pemerataan, aspek keadilan, aspek keberpihakan, dan aspek insentif kinerja sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana praktik kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah di tingkat desa secara langsung, maka di bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan praktik kebijakan serupa di beberapa negara. Alokasi anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari Rp20,7 triliun di 2015 hingga mencapai Rp71,2 triliun di 2020. Dengan demikian, jika pada 2015 rata-rata desa menerima sebesar Rp280 juta, maka di 2020 tiap desa diperkirakan dapat memperoleh Dana Desa sebesar Rp950 juta. UU Desa mengamanatkan pendistribusian Dana Desa yang merata dan berkeadilan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan formula pengalokasian Dana Desa. Variasi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis memberikan konsekuensi bahwa kebutuhan daerah cenderung bersifat heterogen sehingga besarnya porsi Alokasi Dasar justru mendorong desa tidak menerima alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhannya. Perbandingan distribusi Dana Desa yang diterima per desa berdasarkan formula 90/10 dengan formula variabel dimana bobot Alokasi Formula sebesar 100 persen menunjukkan hal tersebut. Formula 90/10 menghasilkan sebaran jumlah Dana Desa yang relatif lebih seragam. Selanjutnya, Lewis mencoba mengukur kesalahan alokasi Dana Desa tahun 2015 dengan cara menghitung perbedaan dari alokasi yang diterima desa dengan formula 90/10 dengan alokasi yang seharusnya didapat desa jika memperhitungkan kebutuhan fiskal desa. Studi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan alokasi Dana Desa dimana beberapa daerah mendapatkan alokasi yang lebih rendah dan lebih tinggi dari yang seharusnya. Indonesia

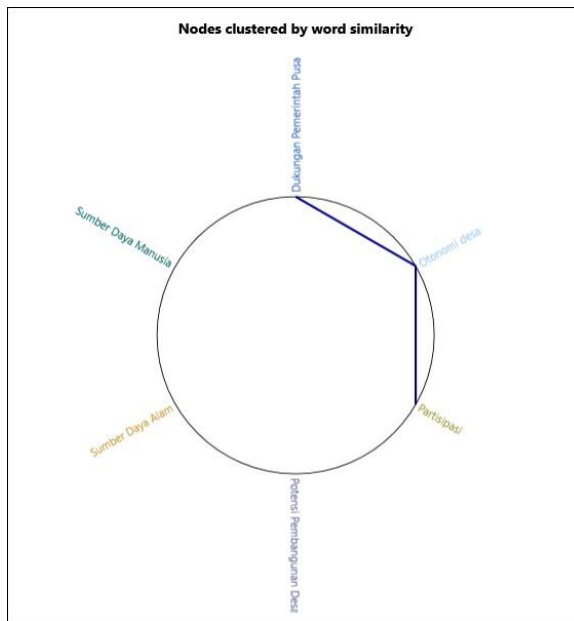
bagian timur menjadi daerah yang paling dirugikan karena daerah tersebut menerima dana desa 70 persen lebih rendah dari yang seharusnya, sedangkan Kalimantan menjadi daerah yang paling diuntungkan karena mendapatkan Dana Desa sebesar dua kali lipat dari yang seharusnya. Studi KOMPAK menemukan bahwa pengalokasian Dana Desa yang dilakukan dengan formula 90/10 cenderung kurang proporsional terhadap jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Komponen yang membentuk alokasi Dana Desa saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan terdiri dari Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja. Pada dasarnya, masing-masing jenis alokasi tersebut dapat kita sandingkan dengan prinsip alokasi yang diamanatkan UU Desa, yaitu pemerataan, keadilan, keberpihakan, dan insentif. Secara spesifik, aspek pemerataan dicerminkan oleh Alokasi Dasar, aspek keadilan oleh Alokasi Formula, aspek keberpihakan oleh Alokasi Afirmasi, dan aspek insentif oleh Alokasi Kinerja. Alokasi Dasar masih patut dipertahankan karena merupakan cerminan dari prinsip pemerataan dalam penyelenggaraan Dana Desa. Mengingat porsi Alokasi Dasar diusulkan sebesar 50 persen, maka Alokasi Formula dapat dinaikkan hingga mencapai 45 persen. Secara sederhana, untuk mendorong distribusi Dana Desa yang lebih adil namun tetap memiliki unsur pemerataan, maka Alokasi Dasar turun 19 persen dan Alokasi Formula naik 17 persen. Dalam formula baru ini, selisih bobot antara Alokasi Dasar dan Alokasi Formula lebih kecil dari selisih dalam formula lama. Dengan demikian, aspek keadilan yang tercermin dari Alokasi Formula memiliki pengaruh yang hampir sama dengan aspek pemerataan yang tercermin dari Alokasi Dasar dalam menentukan besaran Dana Desa yang diterima suatu desa.

Dengan adanya alokasi ini, desa-desa yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih lemah dibandingkan desa-desa lain dapat memperoleh tambahan Dana Desa dari Alokasi Afirmasi. Dalam formula saat ini, bobot Alokasi Afirmasi ditetapkan sebesar 1,5 persen. Berdasarkan analisis bagian sebelumnya, bobot Alokasi Afirmasi dapat ditingkatkan menjadi 2,5 persen. Alokasi Afirmasi yang lebih besar merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di desa-desa yang relatif tertinggal. Namun demikian, Alokasi Afirmasi sebaiknya tidak dimaksudkan untuk terus ada dalam jangka panjang. Ruang adalah dimensi mendasar

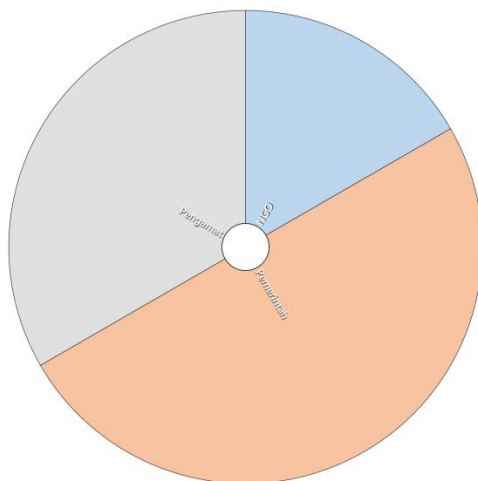
dalam kehidupan manusia. Salah satu elemen kota yakni ruang publik, menjadi wajah kota yang menghadirkan kegiatan interaksi sosial-budaya masyarakatnya. Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh semua orang tanpa intimidasi dari berbagai kepentingan. Dalam perkembangannya, ruang dapat menjadi komoditas yang dapat dibatasi hak penggunaannya oleh kelompok yang memiliki pengaruh pada ruang tersebut. Akses ruang publik tentu menjadi hak setiap warga, namun praktik tidak selalu sejalan dengan idealisme. Dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk pemanfaatan ruang publik kota perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerjasama multipihak menjadi fokus dalam SDGs khususnya pada tujuan No. 17. Kota Surabaya memiliki ruang publik yang menjadi salah satu ikon kota yaitu Taman Bungkul, Taman Harmoni, dan Balai Pemuda. Penelitian ini berupaya mengupas keberadaan serta peran pemangku kepentingan yang mendasari hak atas ruang tersebut. Studi komparasi menjadi metode dalam memahami perbedaan karakteristik ruang publik yang aksesibel dan sebaliknya. Peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam perluasan akses ruang publik patut menjadi perhatian. Kerjasama multipihak diharapkan mampu memberikan akses ruang publik yang menjadi hak tiap warga lebih besar dan mendukung keberlanjutan ruang publik itu sendiri..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menunjukkan gambar diatas hasil yang didapatkan dari rencana Pemerintah Desa kebanyakan lebih diutamakan program-program bantuan yang bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih banyak dari pemerintah pusat kemudian diimbangi oleh peningkatan SDM.

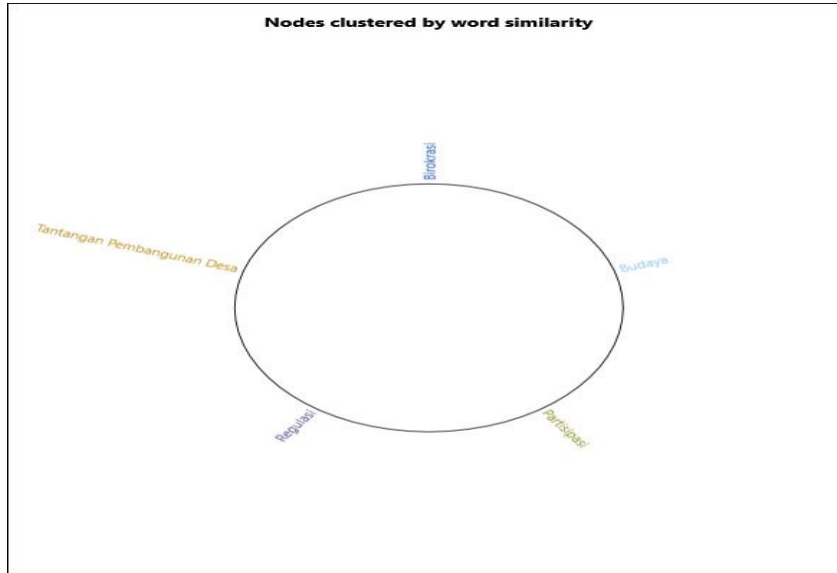


Menurut gambar diatas Hasil dari analisis melalui jenis potensi pembangunan desa yang tertinggal dimana setiap sub dari potensi pembangunan pastinya saling terhubung selanjutnya beberapa subfaktor yaitu dukungan pemerintah pusat, partisipasi, dan sumber daya alam kemudian sumber daya manusia tetapi semuanya saling berhubungan, tetapi tiap jenis subfaktor pasti memiliki perbedaan keterkaitan atau hubungan antar sub faktor yang sangat berbeda.



Berdasarkan menurut gambar tersebut, potensi dukungan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung dan membantu dalam ekonomi desa. Sementara pihak NGO dan pengamat tidak terlibat dalam potensi desa. Salah satu pernyataan dari yang dapat menjelaskan minimnya keterlibatan subfaktor seperti NGO, dan pengamat umum mungkin kurangnya minat

mereka serta kurangnya terlibat di dalam program pembangunan dan pemerataan desa



Sesuai menurut gambar diatas, bisa dijelaskan bahwa faktor birokrasi, budaya masyarakat, partisipasi dari masyarakat yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur didesa memiliki keterkaitan. Tetapi mempunyai faktor yang keterkaitannya tidak terlalu kuat, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar tersebut yang ada diatas. Misalnya Partisipasi dengan yang lainnya, mempunyai garis yang sama lemah Sedangkan yang memiliki keterkaitan sangat lemah ialah Regulasi dengan Sumber Daya Manusia, Ketepatan Sasaran, dan Partisipasi yang digambarkan dengan garis yang sangat tipis

### Diskusi Hasil

Arti penting pendidikan bagi sebuah bangsa adalah untuk memerdekakan manusia melalui pendidikan berkelanjutan. Indonesia menggunakan 3 indikator dokumen SDGs sebagai upaya mewujudkan pendidikan sebagai wahana pembangunan manusia/*human development*. Pemerataan kualitas pendidikan, pendidikan inklusif, pembelajaran seumur hidup untuk semua dan kesetaraan gender merupakan tujuan ke-4 dari SDGs dalam menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Target pembangunan universal SDGs



membutuhkan dukungan semua elemen yaitu pemerintahan, LSM, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari indikatornya yaitu (1) persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah; (2) angka kelulusan SD, SMP dan SMA; dan (3) APK Pendidikan Tinggi (<http://lilimulyatna.com>) belum memadai. Adapun strateginya meliputi upaya (1) melaksanakan wajib belajar 12 tahun; (2) meningkatkan akses layanan pendidikan, pelatihan, keterampilan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan formal; (3) memperkuat *quality assurance* melalui pelayanan pendidikan; (4) memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (5) memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (6) meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru secara tepat; (7) meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (8) meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (9) meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (10) meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. Efisiensi sumber belajar sebagai media belajar menjadi salah satu upaya dan strategi solutif untuk dapat mengawal implementasi SDGs ini agar mutu pendidikan menjadi lebih baik. Efisiensi sumber belajar dalam pembelajaran memerlukan pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran, dan kompetensi guru yang dapat menjembatani itu semua. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada *student centered approach* perlu dilihat bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan yang perlu dipahami oleh setiap guru profesional. Oleh karena itu, keunikan ini diberi tempat untuk berkembang optimal dengan memberdayakannya. Dunia peserta didik adalah dunia bermain, kreatif dan belajar aktif. Belum banyak guru yang mampu mengaktifkan belajar peserta didiknya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya sebagai media belajar dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan perlu dilakukan agar pengalaman belajar langsung melalui efisiensi dan optimalisasi sumber belajar sebagai media belajar atau *previous experience*. Efisiensi sumber belajar sebagai *previous experience* menurut Bruner, mampu mengembangkan kognitifnya melalui 3 tahap proses yaitu (1) enaktif (aktivitas memahami lingkungan); (2) ikonik (memahami objek melalui gambar/visualisasi verbal); dan (3) simbolik (lahir ide abstrak didukung kemampuan berbahasa dan berlogika yang baik).

Berdasarkan konteks belajar, efisiensi memiliki pengertian untuk meningkatkan kualitas belajar dan penguasaan materi belajar; mempersingkat waktu belajar; meningkatkan kemampuan guru, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas belajar mengajar itu sendiri. Guru menjadi pihak yang aktif dan peserta didik adalah pihak yang melaksanakannya sebagai bentuk dari usaha belajar. Konsep pendidikan alternatif seperti yang sudah dilakukan oleh Saur Marlina “Butet” Manurung adalah salah satu upaya menerapkan efisiensi sumber belajar sebagai media belajar. Butet Manurung telah memberi manfaat bagi masyarakat di pedalaman suku kubu/anak dalam di pedalaman Jambi dengan cara memanfaatkan apapun sumber belajar yang ada sebagai media pemahaman dan transformasi pengetahuan. Pola pendidikan semacam ini pas untuk anak Indonesia dan mulai diterapkan oleh sebagian besar guru-guru mengabdikan di wilayah. berpengaruh secara langsung dalam proses belajar mengajar dan keberhasilan pembelajaran. Dalam upaya mewujudkan masyarakat belajar (*learning community*) harus diciptakan kondisi sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman belajar melalui berbagai sumber belajar, baik yang dirancang (*by design*) maupun yang dimanfaatkan (*by utilization*). Di sisi lain tuntutan pendidikan seperti kebutuhan akan kurikulum yang berbasis kompetensi, belajar terbuka, belajar jarak jauh dan belajar secara luwes, mendorong dimanfaatkannya berbagai sumber belajar secara luas (Wina Senjaya, 2007: 176). Sumber belajar tidak harus mahal, mewah atau sulit didapat. Akan tetapi lebih kepada sejauhmana kreativitas dan kemauan para guru berinovasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada dengan efisien-optimal. Menurut praktisi pendidikan Eric Ashby ada beberapa ciri sumber belajar yaitu (1) sumber belajar pra-guru, sumber belajar utamanya adalah orang, lingkungan keluarga/kelompok, benda seperti dedaunan, kulit pohon dsb agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik lebih banyak dengan cara *trial and error*. (2) Kedua, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Perubahan terjadi pada cara pengelolaan, isi ajaran, peran orang, teknik dan lainnya. (3) Ketiga, sumber belajar bentuk cetak. Tugas guru relatif lebih ringan karena adanya sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak ini meliputi buku, majalah, modul, makalah dan lainnya. (4) Keempat, sumber belajar produk teknologi komunikasi/audio visual aids/AVA yaitu sumber belajar dari bahan audio (suara), visual (gambar), kombinasi (Eveline Siregar, 11 Februari 2008). Menurut Nana Sudjanamenjelaskan bahwa pengertian sumber belajar juga dapat berupa (1)

sumber belajar tercetak yaitu buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, ensiklopedi, kamus dan *booklet*; (2) sumber belajar non cetak yaitu film, *slides*, video, model, transparansi, objek langsung; (3) sumber belajar berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olah raga; (4) sumber belajar sebagai kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi dan permainan; (5) sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat seperti taman, Agenda pembangunan SDGs menjadi prioritas pembangunan masa depan.

Pembangunan pendidikan dilakukan dengan berbagai cara seperti (1) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pendidikan; (2) penyelesaian masalah-masalah pembelajaran dengan mengoptimalkan sumber belajar; (3) memanfaatkan secara efisien sumber belajar sebagai media pembelajaran; dan (4) melakukan efisiensi, pendekatan dan metode belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berkenaan hal tersebut maka muncul suatu pemikiran alternatif untuk bagaimana mengoptimalkan efisiensi sumber belajar sebagai media belajar di lingkungan daerah 3T. Efisiensi sumber belajar sebagai media belajar dalam pembelajaran memerlukan pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran, dan kompetensi guru. Pendekatan pembelajaran berpusat pada *student centered approach* supaya efisiensi sumber belajar dapat optimal mendukung media belajar dalam proses pembelajaran. Efisiensi sumber belajar sebagai *previous experience* mampu mengembangkan kognitifnya melalui 3 tahap yaitu (1) enaktif (aktivitas memahami lingkungan); (2) ikonik (memahami objek melalui gambar/visualisasi verbal); dan (3) simbolik (lahir ide abstrak didukung kemampuan berbahasa dan berlogika yang baik). Berdasarkan konteks belajar, efisiensi memiliki pengertian untuk meningkatkan kualitas belajar dan penguasaan materi belajar, walaupun dalam lingkungan belajar yang masih memiliki keterbatasan sarana prasarana. Gerakan revolusi mental Korea Selatan mengajak masyarakatnya untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri melalui kerja sama yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Gerakan ini berhasil membangkitkan keinginan masyarakat untuk membangun desa sehingga mendukung kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Program ini berhasil membawa Korea Selatan dari negara miskin menjadi negara berpengaruh di dunia. Pada era 1970-an, Korea Selatan melalui sistem ini berhasil menurunkan angka kemiskinan nasional sebesar 17,1%. Pendapatan perkapita penduduk meningkat tajam dari US\$ 1.025 pada tahun 1971 menjadi US\$ 2.961 pada tahun 1977. Sejak saat itu, sistem ini dikaji secara intensif, diformulasi secara terpadu, dan telah diadopsi oleh 70 negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Douglass, 2013). Dibawah pemerintahan Park Chung Hee rencana pembangunan lima tahun pada tahap ketiga (1972-1976) dilaksanakan melalui gerakan Saemaul Undong yang mencanangkan program ketercukupan kebutuhan pangan penduduk dari produksi sendiri serta pembangunan pedesaan melalui modernisasi desaseperti perbaikan jalan desa, listrik masuk desa, pengenalan bibit unggul, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan pelatihan kepemimpinan (Douglas, 2013). Kepercayaan diri masyarakat Korea Selatan menjadi terbentuk dengan sangat baik. Dengan demikian program Saemaul Undong ini memberikan solusi mendasar bagi persoalan-persoalan ekonomi masyarakat pedesaan. Sejalan dengan keberhasilan yang telah dicapai, program ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah bahkan diadopsi oleh beberapa kawasan seperti Asia, Africa dan Amerika (Reed, 2010). Kendati demikian program Saemaul Undong tetap harus menyesuaikan kondisi setiap negara yang mungkin berbeda dari negara asal Saemaul Undong baik dari sisi kapasitas lembaga pemerintahan, kepemimpinan yang kuat, serta kebijakan nasional yang mendukung pengembangan desa. Mengglobalnya program ini menarik perhatian pemerintah Indonesia untuk diterapkan. Ketertarikan Indonesia dalam mengimplementasikan program Saemaul Undong dilatarbelakangi oleh beberapa kemiripan. Pertama, Indonesia seperti halnya Korea Selatan pernah mengalami masa ketidakstabilan politik dan krisis militer. Pasca krisis masyarakat Indonesia meskipun sempat mengalami era swasembada beras tahun 1979 namun jumlah petani semakin berkurang. Hal tersebut berpengaruh besar dalam pengembangan pem(Budianta, 2010)angunan pedesaan sebagai tempat dengan kemiskinan yang tinggi. Kedua, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai dan kearifan lokal gotong royong melalui partisipasi masyarakat secara mandiri (ugm.ac.id, 2016) meskipun demikian di Indonesia nilai-nilai lokal tersebut semakin tergerus dengan arus modernisasi dan industrialisasi sehingga merubah gaya hidup masyarakat menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketiga,

Indonesia dan Korea Selatan adalah dua negara yang mewarisi sektor pedesaan berorientasi ekspor yang berlebihan pada masa pemerintahan kolonial. Meskipun demikian, di Indonesia pembangunan pedesaan tampak belum tuntas seperti apa yang dilakukan

## PENUTUP

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. (Soekidjan & Kj, 2009) implementasi pembangunan berkelanjutan melalui pengentasan kemiskinan bisa diawali dari tingkat lokal. Keberadaan pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mendukung upaya tersebut. Kerjasama internasional daerah dalam hal ini menjadi salah satu sarana pendukung mengatasi kemiskinan dengan mensinergikan pemerintah daerah masyarakat dan mitra luar negeri. Kerja sama internasional Melalui transfer ilmu pengetahuan berupa nilai-nilai lokal seperti disiplin, kerja keras dan gotong royong, masyarakat desa bergerak membangun unit usaha desa melalui pemberdayaan masyarakat. Disisi lain, pengembangan pelayanan publik berupa pembangunan gedung guna dan pembuatan kandang sapi komunal mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan unit usaha sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Sebagai penutup artikel ini memberikan saran bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk juga membuka diri mencari jalan mengembangkan jejaring kerja sama untuk memenuhi kebutuhan domestik daerah. Selain itu pelibatan masyarakat sebagai salah satu agen penting dalam kerja sama internasional akan bermanfaat dalam meringankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja. Untuk pengembangan riset selanjutnya dapat difokuskan pada eksplorasi partisipasi masyarakat dalam mendukung kerja sama internasional daerah mengatasi kemiskinan dalamkerangka pembangunan berkelanjutan Kerjasama multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta akademisi dan media menjadi penting dalam mewujudkan upaya perluasan akses ruang publik kota. Kota yang memiliki ruang publik mencerminkan kota berkeadilan dan berkelanjutan.

Ruang publik yang tersedia merupakan saksi keberhasilan pihak-pihak di dalam kota yang terlibat dan memiliki tujuan yang sama. Sementara kegagalan tersedianya akses terhadap ruang publik, mencerminkan adanya konflik dan perbedaan kepentingan dari pihak yang terlibat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat adalah penting bagi keberlanjutan proses perluasan akses ruang publik, dan juga keterlibatan akademisi mampu menyumbangkan wawasan dan ilmu untuk agenda perluasan akses ruang publik. Tersedianya akses ruang publik menjamin hak yang lebih besar kepada warga atas kotanya. Hal itu menjamin keberlangsungan ruang publik itu sendiri, serta mendukung kota berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas dipaper ini adalah pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meng-nol kankelaparan (*zero hunger*). Dimana pemerintah dunia sedang gencarnya dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dimana salah satu tujuannya untuk meng-nol kan kelaparan didunia , adapun langkah langkah pemerintah untuk meng-nol kan kelaparan adalah dengan memberikan edukasi bagi masyarakat baik itu dalam acara yang dilangsungkan ataupun sosialisasi yang di gelarkan dengan tujuan untuk memperkenalkan strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan dari pada pemerintah mengencarkan goal 2 masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan strategi serta indikatonya belum semuanya diterapkan dan diharapkan untuk tahun 2030 tujuannya sudah terlaksana secara merata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A., & Utami, D. (2016). EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM/MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2014 DI KABUPATEN NGANJUK<sup>28</sup>. In *Seminar Nasional 2016 Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals)* (p. 613).
- Azis, A. (2020). Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila yang Menjadi Dasar Pemerataan Pembangunan Nasional (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat). *Pamulang Law Review*, 2(2), 73-86.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(1).



- Firdaus, P. (2020). PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA. *SOL JUSTICIA*, 3(1), 74-82.
- Handiwibowo, G. A. (2018). Singkronisasi Aktifitas Corporate Social Resposibility (CSR) dan Community Development (CD) dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 111-117.
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAERAH. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1).
- Khoirunurrofik, K., Kurniawan, Y. R., & Wiguna, G. E. (2021). Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran di Masa Pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 43-56.
- Perkasa, M. I., Santoso, E. B., & Setiawan, R. P. (2021, November). KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PERLUASAN AKSES RUANG PUBLIK KOTA. In *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021* (Vol. 1, No. 1, pp. 186-194).
- Rahadian, A. H., & Kencana, M. (2016). Pengaruh disiplin dan motivasi kerja pegawai terhadap efektivitas kerja penanggulangan bencana alam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 185–207.
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), 111-128.
- Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah, D. P. I. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030: Zero Hunger (Goal2).
- Soekidjan, S., & Kj, S. (2009). Komitmen Organisasi sudahkah menjadi bagian dari kita. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25-41.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–

52.